

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, dkk. 2020. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia*. Jakarta.
- Andriani. 2002. Pengaruh pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se- Provinsi Bengkulu. *Tesis*. Program Pasca Sarjana UGM. Jogjakarta.
- Coryanata, Isma.2016. Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Journal of Accounting and Investment* 12.2 : PP 110-125.
- Dobell, Peter dan Ulrich. 2003 . *Parliament's performance in the budget process: A case study. Policy matter*: <http://www.irpp.org>. Diakses pada 2019.
- Detik news. 2018. Korupsi pengadaan lift di kantor BPKAD Kota Palembang. *Media Internet*. <http://m.detik.com/news>. Diakses pada 2018.
- Sripo, dan Suara news.2018. Even-even yang mengeluarkan anggaran Sum-Sel 2018. *Media Internet*. <http://suara.com/news>. Diakses pada 2018.
- Kabar24 news.2018. Pengelolaan dan Aset Daerah atau BPKAD Palembang 2018. *Media Internet*. <http://kabar24.com/news>. Diakses pada 2019.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi analisis Multivariate dengan SPSS. Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim. 2004. Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, dan Korupsi. *Seminar Nasional*, dalam rangka Dies Natalis ke-44. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Juliasuti, Ayu. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. “ *Jurnal Akuntansi* 1.1.
- Krisna P., Loina, Lalolo. 2003. Indikator dan alat ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. *Jakarta Sekretariat Good Publik Governance*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mayasari, Rosalina P. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang baik dan benar sebagai variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*(JENIUS).

- Novatiani, R.Ait, dan Lestari, N. 2014, May. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kota Bandung. *Seminar Nasional*. Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha.
- Okatasari, Rosy. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan keuangan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Daerah. <http://jdih.bpk.go.id>. Diakses pada 2019.
- Peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. <http://jdih.bpk.go.id>. Diakses pada 2019
- Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Anggaran. <http://jdih.bpk.go.id>. Diakses pada 2019.
- Pramono, Agus H. 2004. Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Tesis*. Universitas Brawijaya Malang.
- Roseptalia, Rima.2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sopannah dan Mardiasmo, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *SNA VI*. Surabaya.
- Sopannah, 2003. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Surabaya.
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Seminar Nasional*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia . (2003), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
- _____,(2004), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- _____, (2004), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Werimon, Simson, Imam Ghozali, dan Mohammad Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal X*. Makassar.
- Werimon. Simson. 2005. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Public Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). (Study Empiris Di Provinsi Papua). *Diss.* Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.